

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh Tahun 2012- 2017 merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen renstra Bappeda tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda (Renja SKPD) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012–2017, sehingga Renstra Bappeda Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012–2017.

Bappeda sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara eksplisit tercantum dalam RPJP Kota Banda Aceh 2007-2027 dan secara implisit kedudukan Bappeda untuk penyelenggaraan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dinyatakan dalam RPJMD.

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Banda Aceh dilakukan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda, serta mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Banda Aceh yang tertuang dalam RPJMD. Rencana Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Penyusunan Rencana strategis Bappeda mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan di Bappeda baik unsur pimpinan, unsur staf sekretariat maupun unsur pelaksana bidang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Bappeda Kota Banda Aceh antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;

25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan
 - Nomor : 28 Tahun 2010
 - Nomor : 0199/M PPN/04/2010
 - Nomor : PMK 95/PMK 07/2010tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 - 2029;
28. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 - 2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017 ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Bappeda di dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Substansi renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana APBK Banda Aceh. Berdasarkan pertimbangan

tersebut, Renstra Bappeda Kota Banda Aceh disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan satu dokumen resmi bagi Bappeda Kota Banda Aceh dalam menyusun Rencana Kerja Bappeda (Renja Bappeda) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan.
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi baik Bappeda maupun lingkup Kota Banda Aceh.
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Bappeda agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017 adalah untuk :

1. Mengimplementasikan program-program RPJMD sehingga dapat mencapai visi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai Model Kota Madani.
2. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh *stakeholder*.
3. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Bappeda

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017 disusun dengan mengacu kepada Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Bappeda, Fungsi Renstra Bappeda.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang perundang-undangan terkait.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Struktur organisasi Bappeda, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan 1 eselon dibawah kepala Bappeda.

2.2. Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yg dimiliki Bappeda.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Menguraikan tingkat capaian kinerja Bappeda.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Hasil analisis terhadap renstra yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Bappeda.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Bappeda serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini memuat apa saja tugas dan fungsi Bappeda terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah.

3.3. Telaahan Renstra SKPD dan Renstra Kota Banda Aceh

Mengemukakan apa saja factor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Mereview kembali factor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Bappeda ditinjau dari : gambaran pelayanan Bappeda, Sasaran jangka menengah pada Renstra, Implikasi dari RT/RW bagi pelayanan Bappeda, implikasi KLHS bagi pelayanan Bappeda.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Merumuskan pernyataan Visi dan Misi Bappeda

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda

4.3. Strategi dan Kebijakan

Merumuskan pernyataan strategi dan kebijakan Bappeda dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

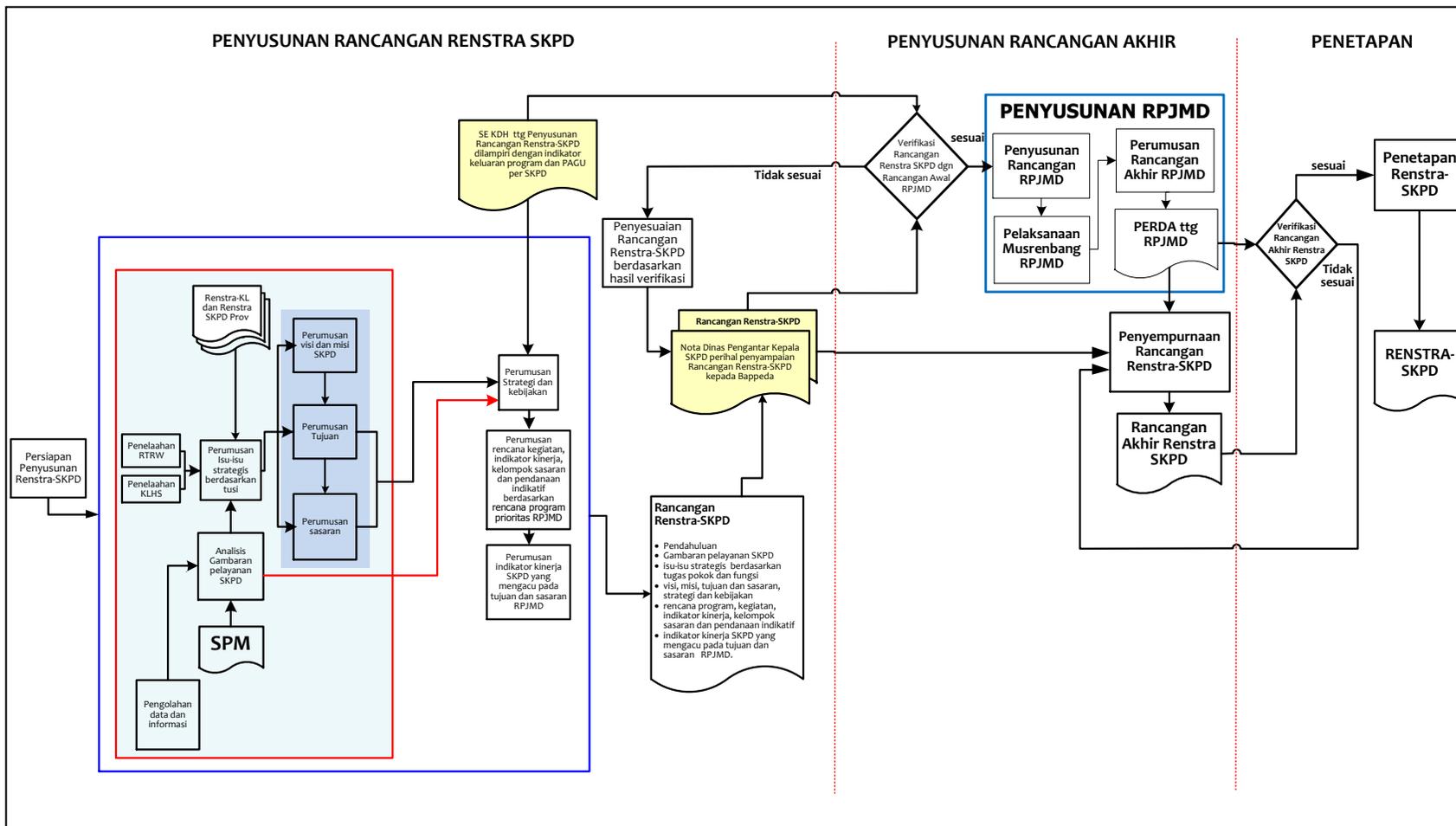
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dikemukakan indikator kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda.

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

Gambar 1.1.
Bagan Alir Penyusunan Renstra



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh, merupakan suatu lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan dibidang perencanaan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 - d. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial;
 - f. Bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Perlengkapan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan kepegawaian.

- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari:
 - a. Subbidang Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; dan
 - b. Subbidang Perencanaan Ketenagakerjaan.

- (4) Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

- a. Subbidang Perencanaan Sarana; dan
 - b. Subbidang Perencanaan Prasarana.
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, terdiri dari :
- a. Subbidang Perencanaan Agama, Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - b. Subbidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Seni Budaya dan Pariwisata.
- (6) Bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari :
- a. Subbidang Data, Statistik dan Penelitian; dan
 - b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. penatausahaan keuangan dan pengelola asset;
- d. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan;
- e. pembinaan sumber daya manusia aparatur;
- f. pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, sosial budaya dan sumber daya manusia;
- g. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBK, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN);
- h. penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah;
- i. pembinaan UPTB;
- j. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan

- k. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kesekretariatan;
- c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan keuangan dan aset;
- f. penataan arsip, dokumentasi dan kepustakaan;
- g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan urusan rumah tangga;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesekretariatan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan dan Perlengkapan sebagaimana mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan dan Perlengkapan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan dan Perlengkapan;
- c. melakukan penataan perlengkapan dan aset badan;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan dan Perlengkapan;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan dan Perlengkapan;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai tugasnya.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja di bidang pengelola Keuangan;
- b. menghimpun penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. menghimpun penyusunan kebutuhan anggaran kas;
- d. melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran;
- e. menyiapkan surat perintah membayar;
- f. melaksanakan penata usahaan keuangan;
- g. melaksanakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan;
- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Keuangan;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Keuangan;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengembangan organisasi dan tata laksana; e.
- e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan dilingkungan Badan;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Umum dan Kepegawaian;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Umum dan Kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- e. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sesuai dengan tugasnya.

Subbidang Perencanaan Ketenagakerjaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Ketenagakerjaan;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Ketenagakerjaan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan Ketenagakerjaan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan Ketenagakerjaan;
- e. menyiapkan bahan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Perencanaan Sarana mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang perencanaan sarana;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di Subbidang perencanaan sarana;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan sarana;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan sarana;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugasnya.

Subbidang Perencanaan Prasarana mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Prasarana;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Prasarana;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan Prasarana;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan Prasarana;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Perencanaan Agama, Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Agama, Pendidikan dan Kesehatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Agama, Pendidikan dan Kesehatan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
- d. lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan Agama, Pendidikan dan Kesehatan; menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan Agama, Pendidikan dan Kesehatan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial sesuai dengan tugasnya.

Subbidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Seni Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Seni Budaya dan Pariwisata;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Seni Budaya dan Pariwisata;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Seni Budaya dan Pariwisata;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Seni Budaya dan Pariwisata;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugasnya.

Subbidang Data, Statistik dan Penelitian mempunyai tugas :

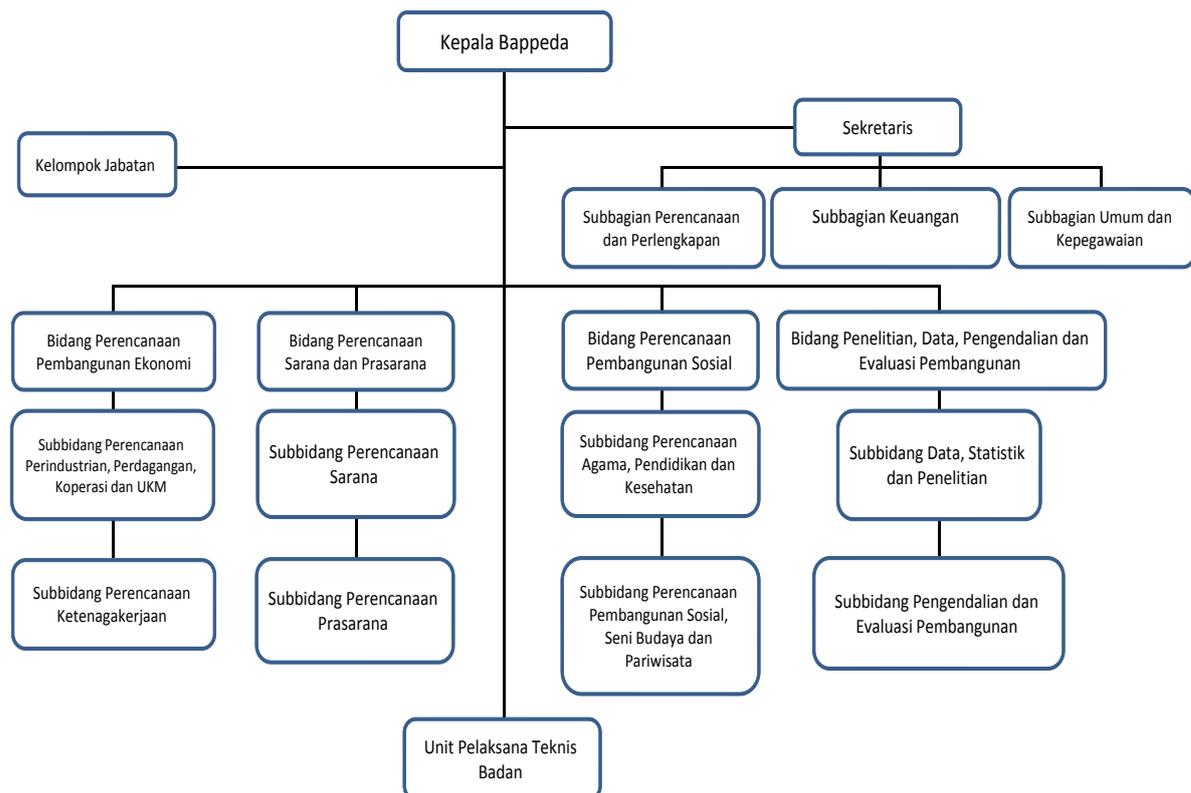
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Data, Statistik dan Penelitian;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Data, Statistik dan Penelitian;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Data, Statistik dan Penelitian;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang Data, Statistik dan Penelitian;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai dengan tugasnya.

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai dengan tugasnya.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Bappeda



2.2. Sumber Daya

Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, jumlah pegawai Bappeda Kota Banda Aceh dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH	Ket
		Laki-laki	Perempuan	(orang)	
	PNS				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	1	-	1	
3	IV/a	2	4	6	
4	III/d	5	7	12	
5	III/c	3	2	5	
6	III/b	5	8	13	
7	III/a	4	2	6	
8	II/d	1	1	2	
9	II/c	1	-	1	
10	II/b	-	-	-	
11	II/a	1	1	2	
12	I/c	1	-	1	
	Jumlah PNS	25	25	50	
	Non PNS				
13	Honorer	-	-	-	
	Jumlah Non PNS	-	-	-	
	JML PNS + NON PNS	25	25	50	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah pegawai Bappeda Kota Banda Aceh sebanyak 50 orang. Seluruh pegawai Bappeda sudah berstatus PNS. Jumlah terbesar PNS pada golongan III/b sebanyak 13 orang, diikuti golongan III/d sebanyak 12 orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Bappeda Berdasarkan Jabatan/Eselonering

No.	Jabatan	Jumlah orang
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Kasubbag	3
4	Kabid	4
5	Kasubbid	8
	Jumlah	17

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Bappeda Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	13
2	S 1	29
3	D III	2
4	SLTA	5
5	SLTP	1
	Jumlah	50

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai Bappeda Kota Banda Aceh terbanyak pada tingkat pendidikan S1 sebanyak 29 orang, diikuti oleh tingkat S2 sebanyak 13 orang dan SLTA sebanyak 5 orang. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawainya, sudah sangat menunjang Bappeda sebagai sebagai sebuah institusi perencanaan.

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja SKPD adalah tersediaannya barang inventaris Bappeda Kota Banda Aceh dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Bappeda Kota Banda Aceh. Pengadaan barang-barang inventaris tersebut berasal dari dana APBK Banda Aceh dan juga atas bantuan dari pihak lain. Rincian tersebut dapat dilihat pada daftar Tabel berikut :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Perlengkapan Bappeda Kota Banda Aceh

No	Uraian	Unit
1.	Tanah	1 parsial
2.	Bangunan Gedung	3 unit
3.	Peralatan dan Mesin	376 unit
5.	Lambang Burung Garuda	1 unit
6.	Peta	3 unit
7.	Instalasi Listrik dan Telepon	1 jaringan

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai satuan kerja bidang perencanaan pembangunan, Bappeda Kota Banda Aceh selama lima tahun tahun terakhir telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan daerah melalui berbagai mekanisme, antara lain dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah, seperti : DPRK, Perguruan Tinggi, LSM, pihak swasta, dan unsur masyarakat sampai ke tingkat gampong (desa).

Secara umum, aspek pelayanan yang diberikan Bappeda Kota Banda Aceh dapat dikelompokkan ke dalam tiga target pelayanan berikut :

1. Unsur Pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan.
2. SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.
3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.

Pelayanan umum yang dilaksanakan Bappeda Kota Banda dalam lima tahun terakhir terdiri dari :

1. Penyusunan Dokumen perencanaan yaitu, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta asistensi penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan dokumen perencanaan yang terkait dengan anggaran seperti KUA, PPAS dan dokumen lain, serta fasilitasi umum perencanaan pembangunan gampong.
2. Penyusunan rencana induk (masterplan), rencana umum, studi kelayakan (*feasibility study*).
3. Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yaitu, berupa pendataan dan analisis kinerja pembangunan daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD serta penyediaan data umum pembangunan daerah.
4. Penelitian dan Pengembangan yaitu penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan strategis pembangunan daerah dan kawasan strategis daerah.
5. Pelayanan ketatausahaan Bappeda yaitu, berupa pengelolaan program dan kegiatan Bappeda, pengelolaan keuangan Bappeda, pengelolaan kepegawaian Bappeda dan ketatausahaan umum lainnya.

Beberapa indikator yang dapat dilihat sebagai tolok ukur kinerja Bappeda dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut :

- Jumlah kerjasama pembangunan antar daerah
- Tingkat penerapan perencanaan partisipatif
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
- Tingkat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Dari indikator-indikator tersebut diatas dapat dilihat kondisi existing Bappeda Kota Banda Aceh secara rinci sebagai berikut :

Guna meningkatkan pembangunan perekonomian antar daerah Bappeda Kota Banda Aceh sudah menjalin kerjasama dengan daerah tetangga melalui program BASAJAN (Banda Aceh, Sabang, Jantho). Melalui kerjasama tiga daerah ini diharapkan akan menjadi suatu kekuatan ekonomi baru pada tahun 2020. Beberapa program yang dilaksanakan antara lain bidang pariwisata, persampahan, air minum dan tata ruang.

Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan pembangunan daerah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) selama ini sudah dijalankan mulai dari pelaksanaan Musrenbang tingkat Gampong, Kecamatan dan Kota. Upaya penjangkauan aspirasi kaum wanita juga dilakukan dengan melakukan kegiatan Musyawarah Rencana Aksi (Musrena) Perempuan. Namun demikian, pelaksanaan kedua mekanisme perencanaan partisipatif tersebut (Musrenbang dan Musrena) tidak serta merta memberikan kepuasan kepada masyarakat karena masih banyak usulan masyarakat belum dapat diakomodir. Hal ini karena kendala ketersediaan jumlah anggaran yang tidak seimbang dengan kebutuhan. Selain itu karena adanya kepentingan dan pandangan yang berbeda, antara kebutuhan menurut pandangan masyarakat, dengan kebutuhan menurut pengambil kebijakan.

Kapasitas kelembagaan Bappeda sebagai institusi perencanaan belum sampai pada taraf yang sempurna. Dukungan sumber daya manusia dalam hal perencanaan masih kurang. Masih diperlukan peningkatan kapasitas bagi aparatur Bappeda agar dapat menjadi aparatur perencana yang cakap dan dapat mengkoordinir setiap perencanaan pembangunan.

Dengan kondisi yang ada, Bappeda Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 2007-2012 sudah menghasilkan beberapa dokumen perencanaan dan sudah diimplementasikan melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh SKPD. Dokumen yang sudah dihasilkan yaitu :

Tabel 2.5
Dokumen yang dihasilkan Bappeda
Tahun 2007-2012

No	Dokumen	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007-2027 (RPJP)	√					
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012	√					√
3	Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	√	√	√	√	√	√
4	Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	√	√	√	√	√	√
5	Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)	√	√	√	√	√	√
6	Banda Aceh Dalam Angka	√	√	√	√	√	√
7	Profile Daerah Banda Aceh	√			√		
8	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	√	√	√	√	√	√
9	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)	√		√			√
10	Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)			√			√
11	Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM)	√					√
12	Data Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, PJSDA, Kesehatan, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Kependudukan	√	√				
13	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)						√

Tabel 2.6
Review pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Qanun	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	90%	18%	18%	18%	18%	18%	16%	16%	16%	16 %	16 %	80%	80%	80%	80%	80%
5	Buku "Banda Aceh Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
6	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

(000)

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke.. (Rp)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke.. (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke.. (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	2.328.040	2.485.043	2.792.067	3.014.027	3.202.307	2.184.987	2.426.890	2.792.067	2.713.103	3.113.531	93,86	97,66	100	90,02	97,23	1,25	2,95
- Belanja Pegawai	2.328.040	2.485.043	2.792.067	3.014.027	3.202.307	2.184.987	2.426.890	2.792.067	2.713.103	3.113.531	93,86	97,66	100	90,02	97,23	1,25	2,95
Belanja Langsung	1.989.465	1.416.017	1.898.336	1.714.486	1.548.838	1.774.552	1.261.197	1.561.126	1.468.650	1.395.432	89,20	89,07	82,24	85,66	90,10	(1,93)	(1,00)
- Belanja Pegawai	1.123.790	773.620	816.730	784.010	555.225	1.100.596	685.505	658.875	667.649	508.115	97,94	88,61	80,67	85,16	91,52	(5,84)	(4,78)
- Belanja barang dan jasa	743.275	615.204	903.221	809.939	734.912	551.888	548.932	732.174	680.729	634.437	74,25	89,23	81,06	84,05	86,33	(1,85)	(1,36)
- Belanja Modal	122.400	27.193	178.385	120.537	258.701	122.067	26.760	170.077	120.272	252.880	99,73	98,41	95,34	99,78	97,75	22,92	22,05
Total	4.317.505	3.901.059	4.562.057	4.728.513	4.751.145	3.959.539	3.688.087	4.353.193	4.181.753	4.508.963	91,71	93,36	91,12	88,44	94,90	2,02%	0,64%

Dari tabel 2.7 terlihat bahwa rasio antara total realisasi anggaran dan total anggaran termasuk dalam kategori baik dimana rata-rata mencapai antara 91-95 persen. Dari tabel juga terlihat rasio antara realisasi dan anggaran pada belanja tidak langsung rata-rata mencapai diatas 90 persen. Sedangkan untuk Belanja Langsung rasionya rata-rata mencapai diatas 80 persen. Pada belanja langsung tidak ada realisasi anggaran sampai 100 persen, karena adanya selisih harga negosiasi pada kegiatan yang dilaksanakan pihak ketiga dan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan 100%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan total anggaran hanya mencapai sebesar 0,10 persen dan rata-rata pertumbuhan total realisasi hanya mencapai sebesar 1,56 persen. Dari Tabel terlihat rata-rata pertumbuhan pada belanja langsung rata-ratanya mengalami pertumbuhan negatif. Penurunan ini disebabkan menurunnya anggaran yang dialokasikan untuk program kegiatan karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh. Hambatan-hambatan secara umum baik yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan dan mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahap koordinasi, hambatan yang sering muncul adalah adanya hal-hal baru yang muncul bersamaan dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi. Untuk mengatasinya dilakukan prosedur standar yaitu melalui evaluasi dan penilaian sampai dengan ditemukannya prioritas dalam mengatasinya beserta jadwal waktu dalam menanganinya.
- b. Pada sebuah sistem kerja secara utuh maka faktor SDM sangat menentukan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Belum berkembangnya SDM dalam sebuah tim kerja akan berpengaruh terhadap efektifitas dan kualitas pekerjaan. Dari sisi ini, upaya dalam menangani hambatan yang muncul adalah dengan mengintensifkan koordinasi, mengefektifkan materi/bahan koordinasi, dan mengupayakan ketepatan waktu pekerjaan serta mengeksplorasi cara-cara baru yang lebih efektif/efisien.
- c. Pada sisi anggaran, pada umumnya hambatan yang muncul adalah kekurangan telitian dalam administrasi.
- d. Pada sisi program dan kegiatan masih terbatasnya pendapatan baik yang bersumber dari PAD sehingga anggaran yang tersedia sangat terbatas dimana

sebagian besar terserap untuk Belanja Pegawai dan sangat terbatas untuk dialokasikan pada setiap program atau kegiatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

A. Peluang

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan berbasis kawasan.
- 2) Kerjasama Perencanaan Pembangunan Antar Wilayah.
- 3) Meningkatnya partisipasi publik terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- 4) Meningkatnya teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi pembangunan baik dari pusat maupun propinsi.
- 5) Meningkatnya dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah. Meningkatnya dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah.
- 6) Beberapa peraturan perundang-undangan mengamanatkan pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
- 7) Kuantitas SDM aparatur cukup memadai.
- 8) Potensi sumber daya alam yang memadai menjadi faktor pendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

B. Tantangan

- 1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia perencana memungkinkan terjadinya distorsi dalam proses perencanaan yang terintegral dan berkesinambungan.
- 2) Lemahnya basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil penelitian menyebabkan validitas perencanaan dirasakan masih belum optimal.

- 3) Masih belum optimalnya pemahaman masing-masing bidang dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat.
- 4) Kemajuan teknologi informasi dan tingginya tingkat partisipasi publik tidak diimbangi dengan penataan kelembagaan perencanaan daerah yang lebih proporsional dan responsif sesuai dengan visi dan misi yang diembannya.
- 5) Rendahnya dukungan keuangan daerah terhadap proses perencanaan sehingga proses perencanaan pembangunan daerah belum dapat berjalan secara optimal.
- 6) Menjadikan dokumen perencanaan sebagai dasar dan pedoman dalam seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
- 7) Tersusunnya dokumen perencanaan yang sinkron dan runtut sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan
- 8) Mampu mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi duplikasi
- 9) Penyediaan dan update data sebagai dasar perencanaan dan pembangunan
- 10) Peningatan kapasitas sumberdaya manusia yang cakap di bidang perencanaan pembangunan daerah

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi BAPPEDA Kota Banda Aceh sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kelembagaan perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan yang belum optimal;
2. Mekanisme pelaksanaan perencanaan Pembangunan Daerah yang belum optimal;
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur bidang perencanaan, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.
4. Masih belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan;
5. Masih lemahnya sistem pendataan/informasi/data statistik.

Penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fungsi sub satuan perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun pada tingkat Kecamatan dan Desa;
2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan berikutnya;
3. Belum adanya regulasi yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan di Daerah;
4. Koordinasi antar lembaga belum yang optimal;

5. Kualitas analisa data dan informasi perencanaan pembangunan yang belum optimal;
6. Sarana prasarana pendukung masih belum memadai baik kualitas maupun kuantitas;
7. Keterbatasan aparatur perencanaan;
8. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh;
Dengan adanya otonomi, daerah mempunyai kewenangan yang lebih tinggi untuk merencanakan pembangunan di daerahnya. Berkaitan dengan hal itu maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh bisa memanfaatkan hal tersebut, tentunya dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang terkait untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh.
9. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder yang ada di Kota Banda Aceh seperti masyarakat, DPRD , Perguruan Tinggi, NGO, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
10. Belum optimalnya pelayanan prima dalam bidang perencanaan;
Sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam bidang perencanaan, maka sudah tentu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada tupoksi perencanaan Bappeda.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- **Visi**

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017, yaitu **Banda Aceh Model Kota Madani** adalah sebuah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum, dan memiliki ruang publik yang luas. Disamping itu masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, inklusif, mampu bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Keadaan ini diharapkan melahirkan warga Kota Banda Aceh yang memiliki jati diri yang ramah, taat aturan, damai, sejahtera, harga diri, berbudaya, dan beradab.

BAPPEDA Kota Banda Aceh sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Strategis dan Renja SKPD

- **Misi**

Adapun misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah.
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Memperkuat ekonomi kerakyatan.
4. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
5. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami.
6. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan perlindungan anak.

7. Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Banda Aceh dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam jangka panjang.

Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kota Banda Aceh ke depan adalah :

- a. Batasan kondisi fisik dasar kota (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan-kegiatan perkotaan;
- b. Kerawanan terhadap bencana, terkait dengan jalur patahan dan potensi gelombang dari laut, yang mempengaruhi pengembangan fisik di kawasan sepanjang jalur patahan dan di kawasan pesisir pantai;
- c. Perkembangan kebutuhan Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh dan pusat orientasi pembangunan wilayah provinsi;

Sedangkan potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kota Banda Aceh 20 tahun mendatang adalah :

- a. Fungsi Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh;
- b. Peranan Kota Banda Aceh sebagai pusat koleksi-distribusi barang bagi kawasan sekitarnya;
- c. Kota Banda Aceh sebagai orientasi perkembangan bagi kawasan sekitarnya;
- d. Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan, baik untuk skala kota maupun skala regional;
- e. Nilai strategis dan historis Kota Banda Aceh;

- f. Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang lebih memadai dibandingkan dengan daerah sekitar;

Visi Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kota Banda Aceh adalah *“Terwujudnya Banda Aceh Sebagai Kota Tamaddun, Modern dan Islami”*, sedangkan sasaran Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kota Banda Aceh yang ingin dicapai terkait dengan penataan ruang wilayah kota adalah :

- a. Terwujudnya Pembangunan Kota Banda Aceh yang bersih, indah, teduh, nyaman, aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan perikanan;
- c. Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang bernuansa Islami dan masyarakat yang beretika.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pokok di atas, dirumuskan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Banda Aceh adalah *“Mewujudkan Ruang Kota Banda Aceh sebagai Kota Jasa Yang Islami, Tamaddun, Modern dan Berbasis Mitigasi Bencana”*.

Pelaksanaan pembangunan kota Banda Aceh yang menyangkut pemanfaatan ruang harus mengacu pada RTRW Kota Banda Aceh yang telah dituangkan dalam Qanun Walikota No. 04 Tahun 2009. Dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang, Bappeda Kota Banda Aceh adalah SKPD yang paling berperan dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar unsur-unsur terkait.

Program-program di Bappeda terkait erat dengan upaya-upaya untuk mengintegrasikan, memaduserasikan dan mengharmonisasikan rencana tata ruang.

Ruang lingkup koordinasi penataan ruang Kota Banda Aceh meliputi :

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kunci utama dalam terwujudnya pembangunan sesuai RTRW. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berfungsi:

- a. sebagai alat pengendali pengembangan kota;

- b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan dan melindungi kepentingan umum.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, BAPPEDA dihadapkan pada beberapa kendala sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan.
- b. Belum optimalnya sistem pendataan/informasi/data statistik.
- c. Terbatasnya jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Guna meningkatkan fungsi dan kinerja BAPPEDA dalam bidang perencanaan, maka diperlukan penentuan isu-isu strategis yang diharapkan menjadi landasan bagi BAPPEDA dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan. Berdasarkan kondisi yang dihadapi, maka BAPPEDA dihadapkan dengan isu strategis sebagai berikut :

- a. Perencanaan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana, mengingat kota Banda Aceh termasuk daerah rawan bencana, terutama gempa dan tsunami.
- b. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama perencanaan sektoral, diharapkan sesuai dengan komitmen internasional dan penyesuaian dengan peraturan perundangan yang baru.

- c. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sarana dan prasarana wilayah dan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang wilayah dan pengelolaan lingkungan.
- d. Koordinasi antar SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah penanggulangan kemiskinan, pemetaan kawasan rawan bencana, kesetaraan dan keadilan gender dan lain-lain masih belum berjalan optimal.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Langkah penting dalam proses perencanaan strategis adalah mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan yang lebih baik, serta menyatakan hasil-hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diimplementasikan.

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat serta perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, BAPPEDA Kota Banda Aceh yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek dituntut harus mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) serta mampu mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat sehingga eksistensi organisasi dapat terjaga baik kredibilitas maupun akuntabilitasnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka visi BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 adalah

" Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kota Yang Partisipatif Dalam Mewujudkan Banda Aceh sebagai Model Kota Madani"

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka dilaksanakan misi. Misi merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh BAPPEDA sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi BAPPEDA Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja aparatur perencanaan pembangunan yang Profesional
2. Memperkuat sistem perencanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data dan Informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, dan partisipatif
4. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan yang akan dicapai oleh BAPPEDA Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 berdasarkan rumusan Misi dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Meningkatkan efektifitas dan profesionalisme kerja
2. Meningkatkan kualitas data dan informasi untuk perencanaan
3. Meningkatkan Kerjasama pembangunan dengan dunia usaha.
4. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
6. Meningkatkan informasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

4.2.2. Sasaran

1. Terlaksananya Kegiatan Kantor Dengan Efektif dan Profesional
2. Meningkatnya Kualitas Informasi dan Data Perencanaan

3. Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Dunia Usaha/Lembaga
4. Meningkatnya Koordinasi dan Singkronisasi dalam Pengendalian Perencanaan Pembangunan
5. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
6. Terukurnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kapasitas SDM perencanaan pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Kantor Dengan Efektif dan Profesional	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran.	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
			Tersedianya baju Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh	51 Org	54 Org	54 Org	54 Org	54 Org
			Meningkatnya Kompetensi Aparatur	4 Org	6 Org	6 Org	6 Org	6 Org
2	Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan yang terintegrasi, dan berkesinambungan	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Data Perencanaan	Tersedianya Dokumen Data dan Informasi	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
3	Menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan yang aplikatif dan sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Dunia Usaha/Lembaga	Terlaksananya Singkronisasi Kegiatan Lintas Sektoral dan Lintas Wilayah	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Menyusun basis data dan informasi untuk perencanaan pembangunan	Meningkatnya Koordinasi dan Singkronisasi dalam Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Tertanganinya Permasalahan Perencanaan dan Pengembangan Kota	35 kasus	35 kasus	35 kasus	35 kasus	35 kasus
5	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Menjadi Acuan Pelaksanaan Pembangunan.	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok
6	Meningkatkan informasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.	Terukurnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Tersedianya Informasi Pelayanan Kepada Masyarakat.	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Adapun strategi yang ditempuh yaitu :

1. Meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti diklat perencanaan, diklat kepemimpinan, dan teknis fungsional perencana
2. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas SKPD, lintas Pemerintahan dan lintas stakeholders lainnya
3. Menyusun dokumen perencanaan yang partisipatif dan sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya
4. Membangun sistem database yang dapat diakses secara *on line*
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan pelaksanaan pembangunan

4.3.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi SKPD. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Arah kebijakan BAPPEDA tahun 2012-2017:

1. Menyelenggarakan bintek dan mengikutsertakan aparat perencana pada diklat-diklat
2. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama serta melaksanakan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif
3. Membangun komitmen antar pelaku pembangunan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaan
4. Sistem database BAPPEDA terkoneksi dengan SKPD
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap semua kegiatan pelaksanaan pembangunan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan BAPPEDA untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBD, meliputi :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
 - 1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.8. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 1.9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - 1.10. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
 - 1.11. Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 2.1. Pembangunan gedung kantor
 - 2.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 2.3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
 - 2.4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - 2.5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - 2.6. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 3.1. Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi

- 3.2. Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya.
- 3.3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tertentu
- 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - 4.2. Bintek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

A. Program/Kegiatan Urusan Wajib :

- 1. Pengembangan Data dan Informasi
 - 1.1. Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)
 - 1.2. Penyusunan Buku PDRB dan Banda Aceh Dalam Angka
 - 1.3. Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)
- 2. Kerjasama Pembangunan
 - 2.1. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga
- 3. Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
 - 3.1. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tata Ruang
- 4. Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 4.1. Penyusunan Rancangan RPJMD
 - 4.2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPK
 - 4.3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 - 4.4. Penyusunan Kebijakan Umum APBD DAN PPAS
 - 4.5. Penunjang Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perkotaan Penyelenggaraan Musrena
 - 4.6. Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh
 - 4.7. Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RIPJM)
- 5. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - 5.1. Penyusunan Rencana Pengembangan Ekonomi Kelautan Daerah Pesisir
 - 5.2. Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) Terhadap Pelayanan Pemerintah
 - 5.3. Penyusunan Buku Perhitungan dan Analisis Index Pembangunan Manusia di Kota Banda Aceh

Kategori	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SK Penanggungjawab	
						2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1.06.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran pelaksanaan administrasi kantor		602.783.377		600.847.475		660.932.222		727.025.444		799.727.989		3.334.758.107		BAPPEDA
		1.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kelengkapan surat menyurat	12 bln	12 bln	2.000.000	12 bln	2.200.000	12 bln	2.420.000	12 bln	2.662.000	12 bln	2.928.200	12 bln	12.210.200	
		1.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Berfungsinya sarana komunikasi, SDA dan listrik	12 bln	12 bln	108.000.000	12 bln	118.800.000	12 bln	130.680.000	12 bln	143.748.000	12 bln	158.122.800	12 bln	659.350.800	
		1.06.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	12 bln	12 bln	57.400.000	12 bln	63.140.000	12 bln	69.454.000	12 bln	76.399.400	12 bln	84.039.340	12 bln	350.432.740	
		1.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	12 bln	12 bln	39.806.300	12 bln	43.786.930	12 bln	48.165.623	12 bln	52.982.185	12 bln	58.280.404	12 bln	243.021.442	
		1.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat-surat Dinas	12 bln	12 bln	29.738.477	12 bln	32.712.325	12 bln	35.983.557	12 bln	39.581.913	12 bln	43.540.104	12 bln	181.556.376	
		1.06.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik dan elektronika/penerangan kantor	12 bln	12 bln	3.400.200	12 bln	3.740.220	12 bln	4.114.242	12 bln	4.525.666	12 bln	4.978.233	12 bln	20.758.561	
		1.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 bln	12 bln	1.800.000	12 bln	1.980.000	12 bln	2.178.000	12 bln	2.395.800	12 bln	2.635.380	12 bln	10.989.180	
		1.06.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum Pegawai	11 bln	11 bln	88.650.000	11 bln	97.515.000	11 bln	107.266.500	11 bln	117.993.150	11 bln	129.792.465	11 bln	541.217.115	
		1.06.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Keikutsertaan dalam Undangan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	12 bln	12 bln	254.488.400	12 bln	220.000.000	12 bln	242.000.000	12 bln	266.200.000	12 bln	292.820.000	12 bln	1.221.020.000	
		1.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang	Tersedianya jasa Pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa	6 bln	6 bln	7.500.000	6 bln	5.973.000	6 bln	6.570.300	6 bln	7.227.330	6 bln	7.950.063	6 bln	33.150.693	
		1.06.01.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya biaya lembur pegawai	12 bln	12 bln	10.000.000	12 bln	11.000.000	12 bln	12.100.000	12 bln	13.310.000	12 bln	14.641.000	12 bln	61.051.000	

Kategori	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SK Penanggungjawab	
						2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1.06.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana kantor		721.619.850		628.781.835		691.660.019		760.826.020		836.908.622		3.639.796.346		BAPPEDA
		1.06.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pekerjaan pembangunan mushalla kantor	-	1 paket	150.000.000	1 paket	0	1 paket	150.000.000							
		1.06.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 bln	12 bln	416.894.050	12 bln	458.583.455	12 bln	504.441.801	12 bln	554.885.981	12 bln	610.374.579	12 bln	2.545.179.865	
		1.06.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terawatnya gedung kantor	12 bln	12 bln	80.000.000	12 bln	88.000.000	12 bln	96.800.000	12 bln	106.480.000	12 bln	117.128.000	12 bln	488.408.000	
		1.06.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional	12 bln	12 bln	62.380.000	12 bln	68.618.000	12 bln	75.479.800	12 bln	83.027.780	12 bln	91.330.558	12 bln	380.836.138	
		1.06.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	12 bln	12 bln	12.345.800	12 bln	13.580.380	12 bln	14.938.418	12 bln	16.432.260	12 bln	18.075.486	12 bln	75.372.344	
		1.06.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		30.600.000		33.660.000		37.026.000		40.728.600		44.801.460		186.816.060		BAPPEDA
		1.06.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai	57 org	51 org	20.400.000	54 org	22.440.000	54 org	24.684.000	54 org	27.152.400	54 org	29.867.640	54 org	124.544.040	
		1.06.01.03.14	Pengadaan Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian muslim	-	51 org	10.200.000	54 org	11.220.000	54 org	12.342.000	54 org	13.576.200	54 org	14.933.820	54 org	62.272.020	
		1.06.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur		15.000.000		15.750.000		16.537.500		17.364.375		18.232.594		82.884.469		BAPPEDA
		1.06.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pegawai Bappeda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 bln	12 bln	15.000.000	12 bln	15.750.000	12 bln	16.537.500	12 bln	17.364.375	12 bln	18.232.594	12 bln	82.884.469	

Kategori	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SK Penanggungjawab
						2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1.06.01.15	Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data dan informasi perencanaan			403.004.675		443.305.143		487.635.657		536.399.222		590.039.145		2.460.383.841	BAPPEDA
		1.06.01.15.02	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya laporan data dan informasi capaian target pelaksanaan pembangunan Tahun 2012	-	3 Laporan Data dan Informasi	14.433.275	3 Laporan Data dan Informasi	15.876.603	3 Laporan Data dan Informasi	17.464.263	3 Laporan Data dan Informasi	19.210.689	3 Laporan Data dan Informasi	21.131.758	3 Laporan Data dan Informasi	88.116.587	
		1.06.01.15.06	Penyusunan Buku PDRB dan Banda Aceh Dalam Angka	Tersedianya data dan informasi statistik untuk para pemangku kepentingan	2 dokumen (PDRB dan Banda Aceh Dalam Angka)	2 dokumen (PDRB dan Banda Aceh Dalam Angka)	86.873.500	2 dokumen (PDRB dan Banda Aceh Dalam Angka)	95.560.850	2 dokumen (PDRB dan Banda Aceh Dalam Angka)	105.116.935	2 dokumen (PDRB dan Banda Aceh Dalam Angka)	115.628.629	2 dokumen (PDRB dan Banda Aceh Dalam Angka)	127.191.491	2 dokumen (PDRB dan Banda Aceh Dalam Angka)	530.371.405	
		1.06.01.15.07	Pengembangan Informasi dan Data Spasial (GIS)	Tersedianya peta data spasial	- Data spasial sistem drainase zona 4, 5, dan 6- Data spasial bangunan dan persil tanah kec. Kuta Alam dan kec. Kuta Raja	1 bidang	301.697.900	2 bidang	331.867.690	2 bidang	365.054.459	2 bidang	401.559.905	2 bidang	441.715.895	2 bidang	1.841.895.849	
		1.06.01.16	Kerjasama Pembangunan	Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah yang bekerja sama dengan Pemko			253.325.000		278.657.500		306.523.250		337.175.575		370.893.133		1.546.574.458	BAPPEDA
		1.06.01.16.03	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/ Lembaga	Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga Pemerintahan dengan lembaga non pemerintah	4 lembaga	7 lembaga	253.325.000	7 lembaga	278.657.500	7 lembaga	306.523.250	7 lembaga	337.175.575	7 lembaga	370.893.133	35 lembaga	1.546.574.458	

Kategori	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SK Penanggungjawab	
						2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1.06.01.19	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar				83.895.400		92.284.940		101.513.434		111.664.777		122.831.255		512.189.807	BAPPEDA
		1.06.01.19.12	Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tata Ruang	Terlaksananya koordinasi dan musyawarah dalam penyelenggaraan tata ruang	12 bulan	12 bulan	83.895.400	12 bulan	92.284.940	12 bulan	101.513.434	12 bulan	111.664.777	12 bulan	122.831.255	12 bulan	512.189.807	
		1.06.01.21	Perencanaan Pembangunan Daerah	Terkoordinasinya perencanaan pembangunan daerah			666.481.600		733.129.760		806.442.736		887.087.010		975.795.711		4.068.936.816	BAPPEDA
		1.06.01.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RPKK	Terlaksananya koordinasi dan musyawarah pembangunan antara pemerintah dan stakeholders	Tersedianya 4 dokumen perencanaan (Lap. Musrenbang gampong, Lap. Musrenbang kecamatan, Lap. Musrenbang Kota, dan Buku RPKK)	4 dokumen	118.918.400	4 dokumen	130.810.240	4 dokumen	143.891.264	4 dokumen	158.280.390	4 dokumen	174.108.429	4 dokumen	726.008.724	
		1.06.01.21.13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Tersedianya data hasil monev pembangunan daerah	Tersedianya buku laporan monev dan laporan tahunan	2 dokumen	57.127.300	2 dokumen	62.840.030	2 dokumen	69.124.033	2 dokumen	76.036.436	2 dokumen	83.640.080	2 dokumen	348.767.879	
		1.06.01.21.14	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Tersedianya KUA PPAS yang akan dibahas di DPRD	4 dokumen	4 dokumen	116.421.500	4 dokumen	128.063.650	4 dokumen	140.870.015	4 dokumen	154.957.017	4 dokumen	170.452.718	4 dokumen	710.764.900	
		1.06.01.21.16	Penunjang Pelaksanaan Program PNM Mandiri Perkotaan	Terlaksananya koordinasi kegiatan PNM	90 gampong	90 gampong	233.681.900	90 gampong	257.050.090	90 gampong	282.755.099	90 gampong	311.030.609	90 gampong	342.133.670	90 gampong	1.426.651.368	
		1.06.01.21.17	Penyelenggaraan Musrena	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan musrena	1 dokumen	1 dokumen	42.370.700	1 dokumen	46.607.770	1 dokumen	51.268.547	1 dokumen	56.395.402	1 dokumen	62.034.942	1 dokumen	258.677.361	

Kategori	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SK Penanggungjawab
						2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1.06.01.21.18	Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	Terlaksananya rapat kerja Pemerintah Kota	2 dokumen	2 dokumen	97.961.800	2 dokumen	107.757.980	2 dokumen	118.533.778	2 dokumen	130.387.156	2 dokumen	143.425.871	2 dokumen	598.066.585	
		1.06.01.22	Perencanaan Pembangunan Ekonomi				103.074.100		113.381.510		124.719.661		137.191.627		150.910.790		629.277.688	BAPPEDA
		1.06.01.22.11	Penyusunan Buku Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah di Kota Banda Aceh	Tersedianya buku informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kota Banda Aceh	1 dokumen	1 dokumen	58.025.300	1 dokumen	63.827.830	1 dokumen	70.210.613	1 dokumen	77.231.674	1 dokumen	84.954.842	1 dokumen	354.250.259	
		1.06.01.22.13	Penyusunan Buku Perhitungan dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banda Aceh	Tersusunnya buku IPM	1 dokumen	1 dokumen	45.048.800	1 dokumen	49.553.680	1 dokumen	54.509.048	1 dokumen	59.959.953	1 dokumen	65.955.948	1 dokumen	275.027.429	
			JUMLAH				2.823.225.602		2.939.798.162		3.232.990.478		3.555.462.651		3.910.140.698		16.461.617.592	

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kota Banda Aceh

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
							2013		2014		2015		2016		2017				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			1.06.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran pelaksanaan administrasi kantor			588,183,377		624,150,000			654,755,000		699,980,000		715,352,800		3,282,421,177	BAPPEDA	Banda Aceh
			1.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kelengkapan surat menyurat	12 bln	12 bln	2,000,000	12 bln	2,250,000	12 bln	2,500,000	12 bln	2,500,000	12 bln	2,500,000					
			1.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Berfungsinya sarana komunikasi, SDA dan listrik	12 bln	12 bln	108,000,000	12 bln	118,800,000	12 bln	130,680,000	12 bln	143,748,000	12 bln	158,122,800					
			1.06.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya tenaga/alat-alat kebersihan kantor	12 bln	12 bln	57,400,000	12 bln	62,000,000	12 bln	64,000,000	12 bln	65,000,000	12 bln	65,000,000					
			1.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	12 bln	12 bln	39,806,300	12 bln	42,000,000	12 bln	45,000,000	12 bln	45,000,000	12 bln	45,000,000					
			1.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak & Pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan surat-surat Dinas	12 bln	12 bln	29,738,477	12 bln	32,000,000	12 bln	32,000,000	12 bln	35,000,000	12 bln	35,000,000					
			1.06.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik dan elektronika/penerangan kantor	12 bln	12 bln	3,400,200	12 bln	3,700,000	12 bln	4,050,000	12 bln	4,500,000	12 bln	4,500,000					
			1.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 bln	12 bln	1,800,000	12 bln	2,000,000	12 bln	2,200,000	12 bln	2,500,000	12 bln	2,500,000					
			1.06.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai	Tersedianya makan dan minum Pegawai	11 bln	11 bln	88,650,000	11 bln	91,150,000	11 bln	103,250,000	11 bln	103,250,000	11 bln	103,250,000					
			1.06.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpeenuhinya Undangan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bln	12 bln	239,888,400	12 bln	250,000,000	12 bln	250,000,000	12 bln	275,000,000	12 bln	275,000,000					
			1.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang	Tersedianya jasa Pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa	6 bln	6 bln	7,500,000	6 bln	8,250,000	6 bln	9,075,000	6 bln	9,982,000	6 bln	10,980,000					
			1.06.01.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya biaya lembur pegawai	12 bln	12 bln	10,000,000	12 bln	12,000,000	12 bln	12,000,000	12 bln	13,500,000	12 bln	13,500,000					
			1.06.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana kantor			829,260,850		970,880,000			813,880,000		859,100,000		905,460,000		4,378,580,850	BAPPEDA	Banda Aceh
			1.06.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor (pembangunan mushalla)	Terlaksananya pekerjaan pembangunan mushala kantor	0	1 unit	150,000,000					0		0		0				
			1.06.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor (pembangunan pagar dan Landscape)	Terlaksananya pekerjaan pembangunan Pagar dan Landscape	0			70 m dan 200 m2	180,000,000			0		0		0				
			1.06.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 bln	12 bln	524,535,050	12 bln	550,000,000	12 bln	550,000,000	12 bln	575,000,000	12 bln	600,000,000					
			1.06.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terawatnya gedung kantor	12 bln	12 bln	80,000,000	12 bln	160,000,000	12 bln	176,000,000	12 bln	193,600,000	12 bln	212,960,000					
			1.06.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/ Operasional	12 bln	12 bln	62,380,000	12 bln	67,380,000	12 bln	72,380,000	12 bln	75,000,000	12 bln	75,000,000					
			1.06.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	12 bln	12 bln	12,345,800	12 bln	13,500,000	12 bln	15,500,000	12 bln	15,500,000	12 bln	17,500,000					
			1.06.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			30,600,000		32,400,000			36,450,000		36,450,000		36,450,000		172,350,000	BAPPEDA	Banda Aceh
			1.06.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai	57 org	51 org	20,400,000	54 org	21,600,000	54 org	24,300,000	54 org	24,300,000	54 org	24,300,000					
			1.06.01.03.14	Pengadaan Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian muslim	-	51 org	10,200,000	54 org	10,800,000	54 org	12,150,000	54 org	12,150,000	54 org	12,150,000					
			1.06.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur			15,000,000		20,000,000			22,500,000		22,500,000		25,000,000		105,000,000	BAPPEDA	Banda Aceh
			1.06.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pegawai Bappeda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Org	4 Org	15,000,000	5 Org	20,000,000	5 Org	22,500,000	5 Org	22,500,000	5 Org	25,000,000					
			1.06.01.15	Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data dan informasi perencanaan			438,805,275		463,600,000			495,900,000		497,500,000		556,000,000		2,451,805,275	BAPPEDA	Banda Aceh
			1.06.01.15.01	Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Tersusunnya laporan data dan informasi capaian target pelaksanaan pembangunan Tahun 2012	1 Dok	1 Dok	14,433,275	1 Dok	15,800,000	1 Dok	17,400,000	1 Dok	19,000,000	1 Dok	21,000,000					
			1.06.01.15.02	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya pendataan tenaga pendidik dan sarana pendidikan, sd, smp dan sma	1 Dok	1 Dok Pendidikan	35,800,600	1 Dok Kes	35,900,000	1 Dok Pariwisata	38,500,000	1 Dok Ekonomi	38,500,000	1 Dok Pendidkn	40,000,000					
			1.06.01.15.06	Penyusunan Buku PDRB dan Banda Aceh Dalam Angka	Tersusunnya buku informasi perekonomian dan statistik kota banda aceh	2 dokumen (PDRB dan Banda Aceh Dalam Angka)	2 dokumen (PDRB dan Banda Aceh Dalam Angka)	86,873,500	2 dokumen (PDRB dan Banda Aceh Dalam Angka)	86,900,000	2 dokumen (PDRB dan Banda Aceh Dalam Angka)	90,000,000	2 dokumen (PDRB dan Banda Aceh Dalam Angka)	90,000,000	2 dokumen (PDRB dan Banda Aceh Dalam Angka)	95,000,000					

			1.06.01.15.07	Pengembangan Informasi dan Data Spasial (GIS)	Tersedianya peta data spasial Bidang Infrastruktur sistem drainase dan spasial jalan.	Data spasial sistem drainase zona 3 zona	2 Zona	301,697,900	3 Zona	325,000,000	2 bidang	350,000,000	2 bidang	350,000,000	2 bidang	400,000,000				
			1.06.01.16	Kerjasama Pembangunan	Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah yang bekerja sama dengan Pemka			253,325,000		265,000,000		280,000,000		280,000,000		305,000,000		1,383,325,000	BAPPEDA	Banda Aceh
			1.06.01.16.03	Facilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/ Lembaga	Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga Pemerintahan dengan lembaga non pemerintah		7 lembaga	253,325,000	7 lembaga	265,000,000	7 lembaga	280,000,000	7 lembaga	280,000,000	7 lembaga	305,000,000				
			1.06.01.19	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang			83,895,400		86,000,000		92,000,000		95,000,000		95,000,000		451,895,400	BAPPEDA	Banda Aceh
			1.06.01.19.12	Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tata Ruang	Tertanganinya kasus pemanfaatan tata ruang		12 kali	83,895,400	12 kali	86,000,000	12 kali	92,000,000	12 kali	95,000,000	12 kali	95,000,000				
			1.06.01.21	Perencanaan Pembangunan Daerah	Terkoordinasinya perencanaan pembangunan daerah			681,081,600		705,900,000		742,000,000		768,800,000		797,800,000		3,695,581,600	BAPPEDA	Banda Aceh
			1.06.01.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RPKK	Terlaksananya koordinasi dan musyawarah pembangunan antara pemerintah dan stakeholders	Tersedianya 4 dokumen perencanaan (Lap. Musrenbang gampong, Lap. Musrenbang kecamatan, Lap. Musrenbang Kota,	4 dokumen	118,918,400	4 dokumen	120,000,000	4 dokumen	125,000,000	4 dokumen	130,000,000	4 dokumen	135,000,000				
			1.06.01.21.13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Tersedianya buku laporan monev dan laporan tahunan	2 dokumen	57,127,300	2 dokumen	62,800,000	2 dokumen	64,000,000	2 dokumen	65,800,000	2 dokumen	65,800,000				
			1.06.01.21.14	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Tersusunnya Dokumen KAU dan PPAS		4 dokumen	116,421,500	4 dokumen	116,500,000	4 dokumen	128,000,000	4 dokumen	128,000,000	4 dokumen	135,000,000				
			1.06.01.21.16	Penunjang Pelaksanaan Program PNPMM Mandiri Perkotaan	Terlaksananya kegiatan PNPMM		4 Kali	233,681,900	4 Kali	240,000,000	4 Kali	250,000,000	4 kali	260,000,000	4 Kali	275,000,000				
			1.06.01.21.17	Penyelenggaraan Musrena	Terlaksananya Kegiatan Musrena dan tersusunnya dokumen perencanaan		1 dokumen	42,370,700	1 dokumen	46,600,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	52,000,000				
			1.06.01.21.18	Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh	Terlaksananya rapat kerja Pemerintah Kota		2 dokumen	112,561,800	2 dokumen	120,000,000	2 dokumen	125,000,000	2 dokumen	135,000,000	2 dokumen	135,000,000				
			1.06.01.22	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang Terpadu dan Tepat Sasaran			103,074,100		106,000,000		110,500,000		115,000,000		115,000,000		549,574,100	BAPPEDA	Banda Aceh
			1.06.01.22.11	Penyusunan Buku Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah di Kota Banda Aceh	Tersedianya buku Informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kota Banda Aceh		1 dokumen	58,025,300	1 dokumen	60,000,000	1 dokumen	62,500,000	1 dokumen	65,000,000	1 dokumen	65,000,000				
			1.06.01.22.13	Penyusunan Buku Perhitungan dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banda Aceh	Tersusunnya buku IPM		1 dokumen	45,048,800	1 dokumen	46,000,000	1 dokumen	48,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000				
					J U M L A H			3,023,225,602		3,273,930,000		3,247,985,000		3,374,330,000		3,551,062,800		16,470,533,402		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Belum Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD							
5	Buku "Banda Aceh Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada